

**ANALISIS PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN,  
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mranggen)**

Ana Khoirina<sup>1)</sup>, Widaryanti<sup>2)</sup>  
**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara<sup>1)2)</sup>**  
anakhoirina01@gmail.com<sup>1)</sup>, widaryanti@stiepena.ac.id<sup>2)</sup>

**ABSTRACT**

*Accountability in managing village finances is very important. This requires the village government to manage village finances professionally, effectively and efficiently, and accountably. The purpose of this study was to determine the readiness of the village government in realizing accountability for village financial management, so research was conducted on the effect of presenting financial reports, accessibility of financial reports, and internal control systems on village financial management accountability.*

*The subject of this research is the village government in Mranggen District. The sampling technique in this research is saturated sampling technique (census). The data collection instrument in this study was a questionnaire or questionnaire. The research data used primary data, directly through questionnaires and analyzed using SPSS version 26. Data were analyzed to test the hypothesis using multiple regression analysis approach.*

*The results of this study indicate that the presentation of financial reports influences the accountability of village financial management. The accessibility of financial reports has no effect on the accountability of village financial management. The internal control system influences the accountability of village financial management.*

**Keywords:** *Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Statements, Internal Control System, Village Financial Management Accountability*

## 1. PENDAHULUAN

Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat dalam akhir tahun ini. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah UU Nomor, 6 C.E. Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012) Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dituntut agar sesuai

dengan aspek tata pemerintahan yang baik yang salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Makalag, 2017). Akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala (Sweetenia et al., 2019). Namun, setelah penetapan beberapa peraturan terkait prinsip yang mengatur pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan harapan.

Akuntabilitas harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menyebutkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Dasar dan bentuk pelaporan keuangan pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (R. Indonesia, 2010).

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna tersebut harus secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pengguna laporan keuangan. Akuntabilitas dapat dikatakan efektif apabila informasi terkait dalam laporan keuangan tersebut mudah diakses oleh publik. Masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas (Fauziah & Handayani, 2017). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan semakin mudahnya diakses oleh publik maka akan terwujud suatu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas pengelolaan keuangan desa dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami (Sande, 2013). Akses publik yang mudah identik dengan internet, baik melalui sebuah blog atau website tertentu yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Namun pada kenyataan tidak semua desa memiliki website sendiri dan saat ini belum ada desa yang mengunggah laporannya ke website, mereka hanya melaporkannya kepada bupati/walikota melalui camat, kepada BPD, dan kepada sebagian warganya melalui sebuah musyawarah desa.

Pengendalian internal merupakan sistem/ prosedur yang terdapat dalam suatu organisasi untuk melindungi proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Bagi (Ashari & Krismiaji, 2019) menyebutkan bahwa pengendalian internal merupakan rancana organisasi serta tata cara yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva serta menciptakan data yang akurat dan dapat dipercaya.

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada warga desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, membagikan data keuangan secara terbuka serta membagikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan supaya menciptakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa melaksanakan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan *stewardship theory* yaitu tugas pemerintah menyajikan laporan keuangan, membagikan aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal merupakan wujud pelayanan kepada masyarakat desa.

Riset tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih tergolong penelitian yang baru. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu juga masih menunjukkan adanya *Research Gap*. Beberapa penelitian memperoleh hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih rendah sedangkan beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Furqani, 2010)

yang berjudul Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Pemerintah Desa Kalimo Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumeneb) hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas sangat rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BDP pemerintahan di Desa Warisa masih rendah.

Kecamatan Mranggen dijadikan obyek penelitian karena, untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa pada desa-desa se Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Dengan indikator akuntabilitas dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Data yang diambil nanti akan dibandingkan untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa? (2) Apakah terdapat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa? (3) Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa? (4) Apakah terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. (2) Menganalisis apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. (3) Menganalisis apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. (4) Menganalisis apakah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

## **Landasan Teori**

### **Teori Stewardship (Grand theory)**

Teori yang mendasari riset ini merupakan bagian dari agency theory ialah stewardship theory (Jefri, 2018), yang menggambarkan suasana dimana para manajemen bukanlah termotivasi oleh tujuan-tujuan orang namun lebih diperuntukan pada sasaran hasil utama mereka buat kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan kalau terdapatnya ikatan yang kokoh antara kepuasan serta kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals serta manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada kesimpulannya hendak memaksimalkan kepentingan orang yang terdapat dalam kelompok organisasi tersebut.

Implikasi teori stewardship terhadap riset ini, bisa menerangkan eksistensi Pemerintah Desa (*steward*) selaku sesuatu lembaga yang bisa dipercaya serta berperan cocok dengan kepentingan publik dengan melakukan tugas serta gunanya dengan pas untuk kesejahteraan warga (*principal*). Pemerintah desa melakukan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berbentuk penyajian laporan keuangan yang akuntabel serta transparan cocok dengan ciri laporan keuangan (relevan, andal, bisa dimengerti serta bisa dibanding).

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

(Iqbal et al., 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan (Mardiasmo, 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

(Wahyuni et al., 2014) mengemukakan ada dua faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan

keuangan. (Setiawan et al., 2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh pengawasan internal dan eksternal. Selain itu bimbingan teknis (Hanifah & Praptoyo, 2015), pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa (Khusniyatun, 2016), dan kinerja BPD (Istiqomah, 2015) juga dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### **Penyajian Laporan Keuangan**

(KASP, 2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

### **Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Bentuk pertanggungjawaban publik secara terbuka dan jujur adalah berupa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang didukung dengan aksesibilitas. Laporan keuangan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Mustofa, 2012).

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende & Bennet, 2004). (Mulyana, 2006) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Menurut Permendagri 113 laporan keuangan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi atau pelaksanaan APBDes wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses masyarakat.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (R. Indonesia, 2010). Unsur SPIP terdiri atas: (1) Lingkungan pengendalian (2) Penilaian risiko (3) Kegiatan pengendalian (4) Informasi dan komunikasi (5) Pemantauan pengendalian intern.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa se Kecamatan Mranggen. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa se-Kecamatan Mranggen yang berjumlah 57 aparat desa. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh atau sering disebut juga sensus.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jawaban diperoleh dari responden atas beberapa item pertanyaan tentang penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Data primer yang diperoleh menggunakan teknik kuesioner dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis kepada narasumber atau responden berkaitan dengan aspek-aspek penting yang berhubungan dengan variabel penelitian.

Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode penelitian ini digunakan karena lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel independen (penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal) terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa). Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas

a = Konstanta

b<sub>1</sub> X<sub>1</sub> = Penyajian Laporan Keuangan

b<sub>2</sub> X<sub>2</sub> = Aksesibilitas Laporan Keuangan

b<sub>3</sub> X<sub>3</sub> = Sistem Pengendalian Internal

e = Error

### **Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan (Nurmuthmainnah, 2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini menurut (Nurmuthmainnah, 2015) adalah:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pelaporan
4. Pertanggungjawaban
5. Pengawasan

### **Penyajian Laporan Keuangan (X<sub>1</sub>)**

Penyajian Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Keuangan, 2009). Terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur penyajian laporan keuangan menurut peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah pemenuhan karakteristik laporan keuangan yang meliputi:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

### **Aksesibilitas Laporan Keuangan (X<sub>2</sub>)**

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. (Nurmuthmainnah, 2015) mengemukakan bahwa terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas adalah kemudahan masyarakat mendapatkan informasi yang meliputi:

1. Terbuka dimedia massa
2. Mudah diakses
3. Ketersediaan informasi

### **Sistem Pengendalian Internal (X<sub>3</sub>)**

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan (P. R. Indonesia, 2008). Terdapat 5 indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian internal menurut perundang-undangan (P. R. Indonesia, 2008) adalah sistem pengendalian internal yang telah dipraktikan dilingkungan pemerintahan di berbagai negara yang meliputi:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Variabel penelitian ini terdiri dari Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y), Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) dan Sistem Pengendalian Internal (X3).

#### Deskripsi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil analisis statistic deskriptif untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 1 Statistic Deskriptif Variabel Y**

INDIKATOR	N	FREKUENSI SKOR					PRESENTASE SKOR				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (1)	57	0	1	0	34	22	0,0%	1,8%	0,0%	59,6%	38,6%
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (2)	57	0	0	1	25	31	0,0%	0,0%	1,8%	43,9%	54,4%
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (3)	57	0	0	6	30	21	0,0%	0,0%	10,5%	52,6%	36,8%
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (4)	57	0	2	1	38	16	0,0%	3,5%	1,8%	66,7%	28,1%
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (5)	57	0	0	4	38	15	0,0%	0,0%	7,0%	66,7%	26,3%

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa skor maksimum yang dipilih oleh responden untuk setiap indikator adalah 4 dan 5, sedangkan skor minimum yang dipilih adalah 2 dan 3, dan skor yang tidak dipilih oleh responden adalah skor 1. Pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa skor yang paling sering dipilih oleh responden untuk setiap pernyataan adalah skor 4.

#### Deskripsi Penyajian Laporan Keuangan

Hasil analisis statistic deskriptif untuk variabel Penyajian Laporan Keuangan disajikan dalam tabel 2. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa skor maksimum yang dipilih oleh responden untuk setiap indikator adalah 4 dan 5, sedangkan skor minimum yang dipilih adalah 3, dan skor yang tidak dipilih oleh responden adalah skor 1 dan 2. Pada variabel Penyajian Laporan Keuangan skor yang paling sering dipilih oleh responden untuk setiap pernyataan adalah skor 4.

**Tabel 2 Statistic Deskriptif Variabel X1**

INDIKATOR	N	FREKUENSI SKOR					PRESENTASE SKOR				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Penyajian											
Laporan Keuangan (1)	57	0	0	0	43	14	0,0%	0,0%	0,0%	75,4%	24,6%
Penyajian											
Laporan Keuangan (2)	57	0	0	1	47	9	0,0%	0,0%	1,8%	82,5%	15,8%
Penyajian											
Laporan Keuangan (3)	57	0	0	2	42	13	0,0%	0,0%	3,5%	73,7%	22,8%
Penyajian											
Laporan Keuangan (4)	57	0	0	2	44	11	0,0%	0,0%	3,5%	77,2%	19,3%

### Deskripsi Aksesibilitas Laporan Keuangan

Hasil analisis statistic deskriptif untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 3 Statistic Deskriptif Variabel X2**

INDIKATOR	N	FREKUENSI SKOR					PRESENTASE SKOR				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Aksesibilitas											
Laporan Keuangan (1)	57	0	2	6	40	9	0,0%	3,5%	10,5%	70,2%	15,8%
Aksesibilitas											
Laporan Keuangan(2)	57	0	0	0	37	20	0,0%	0,0%	0,0%	64,9%	35,1%
Aksesibilitas											
Laporan Keuangan (3)	57	0	0	1	48	8	0,0%	0,0%	1,8%	84,2%	14,0%

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa skor maksimum yang dipilih oleh responden untuk setiap indikator adalah 4 dan 5, sedangkan skor minimum yang dipilih adalah 2 dan 3, dan skor yang tidak dipilih oleh responden adalah skor 1. Pada variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan skor yang paling sering dipilih oleh responden untuk setiap pernyataan adalah skor 4.

### Deskripsi Sistem Pengendalian Internal

Hasil analisis statistic deskriptif untuk variabel Sistem Pengendalian Internal disajikan dalam tabel 4. Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa skor maksimum yang dipilih oleh responden untuk setiap indikator adalah 4 dan 5, sedangkan skor minimum yang dipilih adalah 3 dan skor yang tidak dipilih oleh responden adalah skor 1 dan 2. Pada variabel Sistem Pengendalian Internal skor yang paling sering dipilih oleh responden untuk setiap pernyataan adalah skor 4.

**Tabel 4 Statistic Deskriptif Variabel X3**

INDIKATOR	N	FREKUENSI SKOR					PRESENTASE SKOR				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Sistem											
Pengendalian Internal (1)	57	0	0	0	39	18	0,0%	0,0%	0,0%	68,4%	31,6'
Sistem											
Pengendalian Internal (2)	57	0	0	2	37	18	0,0%	0,0%	3,5%	64,9%	31,6'
Sistem											
Pengendalian Internal (3)	57	0	0	6	46	5	0,0%	0,0%	10,5%	80,7%	8,8'
Sistem											
Pengendalian Internal (4)	57	0	0	0	35	22	0,0%	0,0%	0,0%	61,4%	38,6'
Sistem											
Pengendalian Internal (5)	57	0	0	2	39	16	0,0%	0,0%	3,5%	68,4%	28,1'

**Uji Kualitas Data  
Uji Validitas**

**Tabel 5 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	X1.1	0,723	0,256	Valid
	X1.2	0,670	0,256	Valid
	X1.3	0,873	0,256	Valid
	X1.4	0,494	0,256	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	X2.1	0,761	0,256	Valid
	X2.2	0,834	0,256	Valid
	X2.3	0,710	0,256	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X3)	X3.1	0,821	0,256	Valid
	X3.2	0,631	0,256	Valid
	X3.3	0,670	0,256	Valid
	X3.4	0,724	0,256	Valid
	X3.5	0,756	0,256	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Y1	0,838	0,256	Valid
	Y2	0,716	0,256	Valid
	Y3	0,838	0,256	Valid
	Y4	0,534	0,256	Valid
	Y5	0,766	0,256	Valid

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan di dalam kuisioner penelitian ini telah menunjukkan nilai r hitung > r tabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data di dalam penelitian ini telah valid.

**Uji Reliabilitas**

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan keamanan skala estimasi. Keandalan menggabungkan kekokohan ukuran dan konsistensi ukuran dalam. Ukuran kekokohan adalah kapasitas instrumen untuk tetap stabil atau tidak berdaya terhadap keadaan apa pun. Keamanan tindakan menunjukkan kesopanan ukuran dalam memperkirakan ide. Suatu perjanjian atau suatu variabel dikatakan kuat jika memberikan nilai Cronbach yang tidak signifikan > 0,06. Konsekuensi dari uji kualitas tak tergoayahkan instrumen dapat ditemukan di tabel terlampir.

**Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan	0,635	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,635	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0,758	Reliabel
	0,789	Reliabel

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

**Tabel 7 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,36158593
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,084
	Positive	,084
	Negative	-,060
Test Statistic		,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

Berdasarkan hasil tabel 7, menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

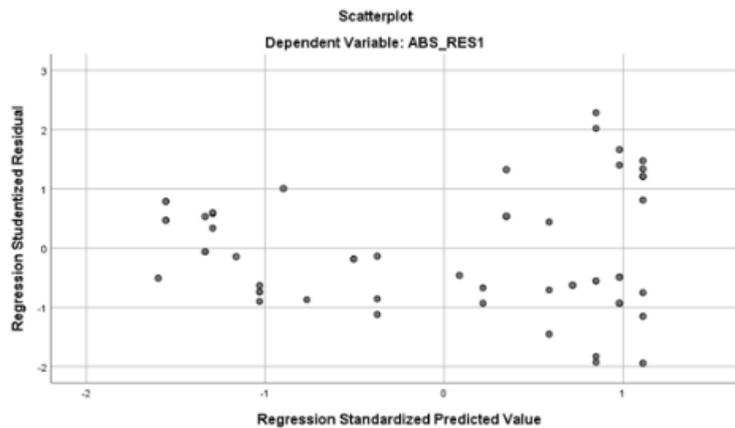
**Tabel 8 Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1 (Constant)	,000		
Penyajian Laporan Keuangan	,026	,915	1,093
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,346	,907	1,102
Sistem Pengendalian Internal	,000	,991	1,009

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 8 menunjukkan bahwa nilai tolerance variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai kurang dari 10. Hasil ini berarti dalam model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot



Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

## Uji Regresi Berganda

Tabel 9 Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	t	Sig.
1 (Constant)	14,408	3,606	3,996	,000
Penyajian Laporan Keuangan	-,315	,138	-2,286	,026
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,151	,158	,950	,346
Sistem Pengendalian Internal	,559	,119	4,698	,000

Berdasarkan Tabel 9 maka persamaan regresi pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = 14,408 + (-0,315) X_1 + 0,151 X_2 + 0,559 X_3 + e$$

- Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 14,408 artinya menyatakan bahwa jika variabel independen bernilai constant maka variabel dependen (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa) adalah sebesar 14,408.
- Koefisien regresi variabel Penyajian Laporan Keuangan ( $X_1$ ) adalah sebesar -0,315 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan penyajian laporan keuangan mengalami kenaikan 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan mengalami penurunan sebesar 0,315.
- Koefisien regresi variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan ( $X_2$ ) adalah sebesar 0,151 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan penyajian Aksesibilitas Laporan Keuangan mengalami kenaikan 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,151.
- Koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Internal ( $X_3$ ) adalah sebesar 0,559 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Sistem Pengendalian Internal mengalami kenaikan

1 satuan, maka Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,559.

- e. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

### Uji Hipotesis

#### Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 10 Hasil Uji Parsial (t-Test)**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	14,408	3,606	3,996	,000
Penyajian Laporan Keuangan	-,315	,138	-2,286	,026
Aksesibilitas Laporan Keuangan	,151	,158	,950	,346
Sistem Pengendalian Internal	,559	,119	4,698	,000

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui hasil uji hipotesis secara parsial sebagai berikut :

- Penyajian laporan keuangan memiliki nilai signifikan sebesar 0,026 lebih rendah dari  $\alpha$  0,05. Artinya hasil pada hipotesis pertama menunjukkan penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka dapat disimpulkan penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diterima.
- Aksesibilitas Laporan Keuangan memiliki nilai signifikan sebesar 0,346 lebih tinggi dari  $\alpha$  0,05. Artinya hasil pada hipotesis kedua menunjukkan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua ditolak.
- Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih rendah dari  $\alpha$  0,05. Artinya hasil pada hipotesis ketiga menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka dapat disimpulkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diterima.

#### Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 11 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Variabel	Nilai	
	F	Sig
Independent Variabel	9,453	,000

Berdasarkan Tabel 11 hasil nilai signifikan sebesar 0,000 lebih rendah dari  $\alpha$  0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Maka dapat dinyatakan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan tabel 12 diatas, didapatkan nilai Adjusted R Square (koefisien Determinasi) atau kemampuan variabel X1, X2, X3 dalam menjelaskan atau memprediksi variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa-desa se Kecamatan Mranggen sebesar 0,312 atau 31,2%. Hal ini berarti variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 31,2% sedangkan sisanya 68,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

**Tabel 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,312	1,39959

### **Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan**

#### **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Hipotesis pertama yang diajukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan adanya hubungan negatif antara penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai koefisien  $-0,315$ . Hasil uji parsial menunjukkan nilai t-hitung penyajian laporan keuangan sebesar  $-2,286$  lebih besar dari nilai t-tabel yang memiliki nilai sebesar  $0,256$ , untuk nilai signifikan penyajian laporan keuangan memiliki nilai sebesar  $0,026$  lebih rendah dari taraf signifikan sebesar  $0,05$ . Artinya penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis pertama yang menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diterima.

Hasil ini menjelaskan bahwa kurangnya pertanggungjawaban penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan public kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan mengakibatkan tidak terwujudnya transparansi pada laporan keuangan, dan nantinya tidak akan terwujud akuntabilitas apabila laporan keuangan yang di sajikan tidak dapat memenuhi informasi yang di butuhkan oleh publik dan para pengambil keputusan.

#### **Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Semakin baik aksesibilitas laporan keuangan desa, maka semakin baik juga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, kemudahan akses yang diberikan bagi para pengguna laporan keuangan akan memicu terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Menurut (Mulyana, 2006) akses yang diberikan dapat berupa media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai signifikan aksesibilitas laporan keuangan sebesar  $0,346$  lebih tinggi dari taraf signifikan sebesar  $0,05$ . Hal tersebut membuktikan bahwa masih kurangnya suatu aksesibilitas dalam menyajikan pengelolaan keuangan desa bagi para penggunanya. Apabila suatu organisasi dapat memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan maka akan memungkinkan berjalannya fungsi kontrol yang baik terhadap pertanggungjawaban penggunaan aset desa maupun kontrol terhadap kebijakan-kebijakan keuangan yang diambil pemerintah. Dengan adanya kontrol yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

#### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal, maka semakin baik juga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Apabila sistem pengendalian internal dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, maka akan memberikan

keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset desa, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut (Hasibuan, 2018) tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset desa, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengendalian internal yang baik akan membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih dapat dipercaya, serta kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terpenuhi.

### **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik desa dalam menerapkan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal secara bersama sama maka akan tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik. Namun dalam penelitian ini ada salah satu variabel independent yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependent, yaitu aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut membuktikan bahwa masih kurangnya suatu aksesibilitas dalam menyajikan pengelolaan keuangan desa bagi para penggunanya.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Mranggen. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Nilai signifikan penyajian laporan keuangan memiliki nilai sebesar 0,026 lebih rendah dari  $\alpha$  0,05. Hasil ini menerima hipotesis pertama.
2. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Nilai signifikan aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai sebesar 0,346 lebih tinggi dari  $\alpha$  0,05. Hasil ini menolak hipotesis kedua.
3. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Nilai signifikan sistem pengendalian internal memiliki nilai sebesar 0,000 lebih rendah dari  $\alpha$  0,05. Hasil ini menerima hipotesis ketiga.
4. Hasil koefisien determinasi pada penelitian ini menunjukkan nilai Adjusted R-square sebesar 0,312, yang artinya persentase variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 31,2%. Sedangkan sisanya 68,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini.

### **Saran**

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya hasil tersebut pemerintah desa harus lebih memperhatikan dalam pengelolaan website maupun medsos desa, supaya masyarakat bisa dengan mudah mengakses tentang laporan keuangan desa, perkembangan desa dan juga program-program desa.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan system pengendalian internal kurang berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini didasari oleh nilai determinasi pada penelitian ini sebesar 31,2% yang artinya sebesar nilai tersebutlah variabel independen yang digunakan dapat menjelaskan variasi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masih tersisa 68,8% faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan jumlah variabel yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut penelitian terdahulu ada beberapa faktor seperti determinan transparansi, pengawasan keuangan, dll.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, S., & Krismiaji, K. (2019). Audit committee characteristics and financial performance: Indonesian evidence. *Equity*, 22(2), 139–152.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 53(9), 1689–1699.
- Furqani, A. (2010). Pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good governance (studi pada pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kaliangget Kabupaten Sumenep). *Veteran" Surabaya*.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(8).
- Indonesia, P. R. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Indonesia, R. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Peraturan Pemerintah*, 71.
- Iqbal, M., Rachman, D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(2), 18–34.
- Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Unair*, 3(1), 1–18.
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Economics Bosowa*, 4(3), 14–28.
- KASP, I. A. I. (2015). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Indonesia*. Jakarta.
- Khusniyatun, S. (2016). *Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pamong Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)*. Skripsi.
- Makalalag, N. M. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Merger Pada Perusahaan Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia (studi kasus pada Bank CIMB Niaga). *Skripsi*, 1(931412021).
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mulyana, B. (2006). *Pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah*. Universitas Gadjah Mada.
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Nurmuthmainnah, W. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas

Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.*

- Sande, P. (2013). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1–16.
- Shende, S., & Bennet, T. (2004). Concept paper 2: Transparency and accountability in public financial administration. *UN DESA*.
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 17(1), 44–56. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2752>
- Wahyuni, P. S., Sulindawati, Ni Luh Gede Erni Trisna, N., & Herawati. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( Studi empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.